

DAFTAR ISTILAH

<i>Odoo</i>	: Perangkat lunak aplikasi bisnis, yang mencakup pengembangan sistem Enterprise Resource Planning yang bersifat fleksibel dan menunjang integrasi data dan informasi di perusahaan.
<i>Invoice</i>	: Berkas dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang diterima oleh pelaku jual-beli sebagai bukti telah menyelesaikan suatu transaksi yang sah.
<i>QuickStart</i>	: Metodologi yang disediakan Odoo untuk melakukan implementasi sistem Odoo secara cepat dan efisien
<i>Realtime</i>	: Sistem yang memproses data secara langsung tanpa adanya penundaan waktu
<i>Report</i>	: Dokumentasi dari suatu proses bisnis
<i>Software</i>	: Perangkat Lunak
<i>Open Sources</i>	: Sebuah aplikasi, sistem atau perangkat lain yang dapat di unduh secara terbuka dan gratis di mesin pencari, media sosial dan lain-lain.
<i>Proprietary</i>	: Sebuah aplikasi, sistem atau perangkat lain yang memiliki lisensi dan perlu membayar bila ingin menggunakannya, dan biasanya digunakan pada skala besar di suatu perusahaan
<i>Real time</i>	: Kinerja sistem dalam menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), merupakan badan usaha ekonomi produktif mandiri, bukan merupakan anak perusahaan maupun waralaba dan terbuka untuk tujuan komersil (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh World Bank (2020), dikonfirmasi bahwa UKM memberikan kontribusi sebanyak 90% pendapatan bisnis dan 50% lapangan kerja di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang.

Penelitian dari Rakib dan Arifin (2018), mendefinisikan UKM sebagai bisnis *fundamental* yang cenderung memiliki ciri khas, meliputi orientasi pasar, budaya dan kepemilikan yang dinamis, sehingga rentan mengalami perubahan baik pengembangan usaha ataupun kebangkrutan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Berdasarkan data penelitian Arianto (2020), UKM mempekerjakan setidaknya sebanyak 10 hingga 200 orang pegawai dalam menjalankan operasional bisnis, dan setiap keuntungan atau proses bisnisnya tidak terpublikasi secara umum.

Berdasarkan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (2020) dan Purwanti (2018), hasil perhitungan *growth percentage*, UKM di Indonesia menyumbangkan sebesar 93,7% pendapatan negara dengan rata-rata pendapatan satu UKM sebesar Rp 76,3 juta rupiah pertahun, sehingga pendapatan UKM di Indonesia secara kumulatif mencapai 60-65 trilyun rupiah. Mayoritas UKM di Indonesia terbagi atas 3 kelompok besar, meliputi; UKM sektor seni dan kerajinan mode (*fashion*) sebanyak 24%, UKM sektor pertanian sebanyak 36.2%, serta tertinggi adalah UKM sektor kuliner sebanyak 48.7% (Purwanti, 2019).

Selain dari jumlah dan pendapatannya yang menjadi primadona bagi para pelaku usaha di Indonesia, menurut Putri dan Suhendi (2021), UKM sektor kuliner juga meraih nilai tertinggi dalam proses digitalisasi bisnis dan adopsi teknologi di Indonesia, meliputi penggunaan ERP, E-commerce, dan sistem informasi digital lainnya. Tingginya digitalisasi UKM sektor kuliner juga disebabkan oleh ketatnya prosedur dalam pengolahan dan operasional bisnis kuliner, kebutuhan UKM untuk bersaing

dengan pesaing bisnis lainnya dilingkungan berbasis daring (*daring*).

Dilihat dari unsur demografis sebaran digitalisasi bisnis UKM, menurut BPS (2020), distribusi digitalisasi UKM sektor kuliner tertinggi sebanyak 76.4%. di Jakarta dan 74,81% Kota Bandung. Penelitian Infithor (2019), menjelaskan bahwa salah satu teknologi digital yang diterapkan oleh UKM sektor kuliner untuk mempercepat digitalisasi operasional bisnis adalah dengan mengadopsi sistem ERP *opensource*. ERP *Opensource* merupakan jenis sistem ERP sumber terbuka dan komprehensif, yang mampu mengelola kekayaan data, serta mengintegrasikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh bisnis, tanpa biaya instalasi dan perawatan yang tinggi. Menurut Ursacescu dkk. (2019) Implementasi dan adopsi sistem ERP *opensource* mampu memberikan manfaat berupa, peningkatan efektivitas komunikasi, kolaborasi kerja antar pegawai, integrasi data, serta kolaborasi operasional bisnis tanpa khawatir dikenakan biaya implementasi yang tinggi.

I.2. Latar Belakang Penelitian

UKM terbukti menjadi tulang punggung bagi perekonomian dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, pada lima tahun terakhir, dengan memberikan kontribusi sebesar 52% lapangan kerja, dan 73% pendapatan negara (Hoppe dkk. 2018). Menurut Ulfa dkk. (2020), berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, UKM digolongkan sebagai bisnis ekonomi rakyat yang diurus oleh perorangan atau sebuah badan usaha lainnya yang bukan merupakan anak perusahaan korporasi ataupun waralaba, dan memiliki kekayaan bersih setidaknya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), dan memiliki jumlah pegawai dengan skala 10 hingga 200 orang, sebagaimana Tabel I.1

Tabel I.1 Klasifikasi UKM di Indonesia

Ukuran Bisnis	Jumlah Pegawai	Pendapatan Minimum	Pendapatan Maksimum
Usaha Mikro	≤ 10	Rp. -	Rp. 50.000.000
Usaha Kecil	10 s/d 60	Rp. 50.000.000	Rp. 300.000.000
Usaha Menengah	61 s/d 200	Rp. 300.000.000	Rp. 3.000.000.000

(Sumber: Pengelompokan Bisnis Berdasarkan Ukuran (BPS, 2019))

Berdasarkan data Kementerian Perkoperasian, jumlah UKM di Indonesia telah

meningkat secara signifikan sebanyak 63%, sejak tahun 2019 hingga 2021. dengan rata-rata pendapatan UKM mencapai 72 juta hingga 27 milyar rupiah pertahun (Lantu dkk. 2016) dan (Retnasari, 2021), sebagaimana Tabel I.2;

Tabel I. 2 Persentase Unit dan Pendapatan Bisnis di Indonesia 2021

Kategori Skala Usaha	Jumlah Unit	Persentase unit usaha	Persentase Tenaga Kerja	Total Pendapatan (Trilyun/Tahun)	Persentase PDB	Rata-Rata Pendapatan Per-unit
Mikro	63.202.312	96,82%	89.01%	4.812	36.20%	Rp 72,450,652
Kecil	759.166	1,60%	4,80%	1.311	10.47%	Rp 1,603,645,332
Menengah	60.772	1,20%	3,11%	1.883	16.33%	Rp 27,812,725,411

(Sumber: Persentase Pendapatan bruto Usaha Bisnis Indonesia (KEMENKOP, 2021))

Tingginya persentase unit dan pendapatan yang dihasilkan oleh UKM, menjadi perhatian dan tanggung jawab penting bagi pemerintah dan masyarakat, untuk saling berkolaborasi dalam mengembangkan potensi bisnis dan keunggulan bersaing, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di pangsa global. Dengan kompetisi pasar yang kian dinamis baik saat ini dan di masa yang mendatang, UKM harus memiliki nilai investasi yang mampu menyokong bisnis dari segi sosio-ekonomi dan lingkungan, guna meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan (Damanhuri, 2018).

Menurut Sari (2020), klaster bisnis UKM yang saat ini berkembang pesat dalam menyumbangkan inovasi dan ekonomi negara, di masa post-pandemi *coronavirus disease 2019*, serta memiliki index pertumbuhan yang signifikan adalah UKM sektor kuliner. Diukur dari segi perspektif pasar, menurut John dkk. (2019) dan Suminten (2019), UKM kuliner merupakan jenis usaha bisnis dengan mobilitas inovasi yang cepat dan dinamis, serta memiliki tingkat survivabilitas bisnis yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh, jenis produk yang dijual oleh UKM kuliner cenderung sangat beragam dan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi hidup manusia. Selain dari tingkat kebutuhan manusia terhadap makanan yang sangat tinggi, UKM kuliner juga memiliki cakupan pasar yang luas, sehingga produk dapat dikreasikan mengikuti perkembangan tren produk yang ada di masyarakat (Suminten, 2019).

Sejalan dengan maraknya transformasi digital di era revolusi Industri 4.0, Usaha

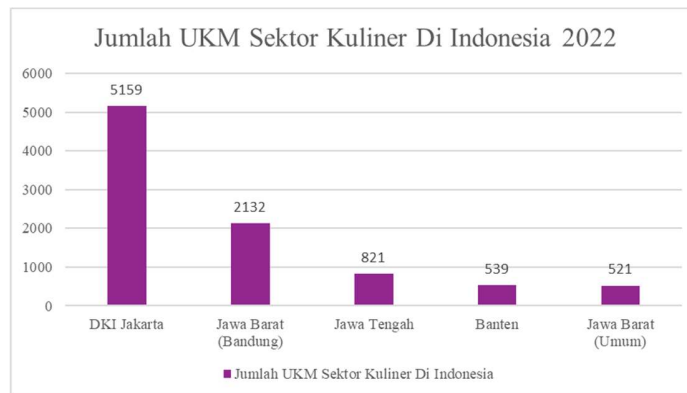
Kecil Menengah (UKM) dan Industri terus berkembang pesat dengan menciptakan berbagai inovasi berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan informasi, pengetahuan, hingga berbagai perencanaan strategi baru, yang sarat kreativitas, sehingga perusahaan mampu untuk bertahan (*establish*), dengan pertumbuhan profitabilitas bisnis yang terus bertumbuh secara jangka panjang (Idah dan Pinilih, 2020). UKM juga menjadi tulang punggung bagi perekonomian dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, dengan memberikan kontribusi sebesar 52% lapangan kerja, dan 73% pendapatan negara (Hoppe dkk. 2018).

Melihat tingginya kontribusi UKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka diperlukan sistem yang mampu mendukung proses operasional agar UKM sektor kuliner mampu berkembang secara stabil dan sinergis, meliputi proses pengelolaan aktivitas operasional yang konkret dan terotomasi oleh sistem (Panduwiya, 2020). Salah satu bentuk digitalisasi yang mampu merealisasikan proses bisnis agar mampu bersinergis dan saling terintegrasi secara efektif adalah dengan merealisasikan digitalisasi bisnis UKM menggunakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) (Bolton dkk.2019).

Menurut Ullah dkk. (2018) *Enterprise Resource Planning* (ERP) adalah seperangkat aplikasi sistem komprehensif yang lengkap, dan dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola semua proses fungsi bisnis di setiap unit fungsional yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ERP merupakan aplikasi yang tergolong sibernetika orde ketiga (*third-order cybernetics*), dimana sistem ERP mampu berkomunikasi, mengelola, mengumpulkan, memproses serta mengintegrasikan informasi penting yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnis kepada seluruh pengguna (mencakup divisi, departemen, maupun kelompok kerja) ke dalam satu database terpusat, berdasarkan modul-modul operasional yang terkandung di dalamnya (Kusumastuti dan Nuryani, 2020).

Sedikitnya telah terdata sebanyak 2403 unit bisnis UKM dan industri kuliner yang telah mengadopsi sistem ERP *opensource* sebagai solusi bisnis yang mampu memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang efektif, peningkatan profitabilitas bisnis, hingga pertumbuhan produktivitas perusahaan (Lakshmanan dkk.

2019).

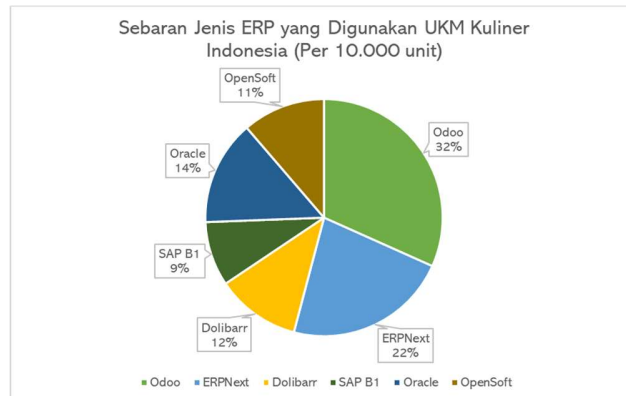


Gambar I. 1 Jumlah UKM Sektor Kuliner di Indonesia 2022

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) sebagaimana tertera pada Gambar I.1, jumlah ketersediaan UKM sektor kuliner di Indonesia, di Jakarta dan Kota Bandung (Jawa Barat), menduduki posisi pertama dan kedua sebagai kota maupun provinsi dengan jumlah UKM sektor kuliner tertinggi di Indonesia berturut-turut sebanyak; 5159-unit (DKI Jakarta) dan 2132-unit (Kota Bandung). Tingginya persentase ini juga didukung dari tingkat kesamaan tren bisnis kuliner yang populer di kedua kota tersebut, meliputi berbagai jajanan tradisional hingga makanan dan minuman kekinian yang menjadi daya tarik masyarakatnya (Bustomi dan Avianto, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suhendi (2021), Kota Bandung dan Jakarta juga meraih nilai tertinggi dalam proses digitalisasi UKM sektor kuliner, khususnya dalam implementasi bisnis digital dan adopsi teknologi di Indonesia, meliputi penggunaan ERP, *e-commerce*, dan aplikasi digital lainnya, dengan persentase sebesar; 76.4%.(Jakarta) dan 74,81% (Kota Bandung).Banyaknya jumlah UKM sektor kuliner serta tingginya persentase digitalisasi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha industri di kota Bandung dan Jakarta, menjadi alasan dipilihnya kota ini sebagai objek penelitian yang tepat dalam menelusuri manfaat dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan adopsi sistem ERP (Suryani, 2021).

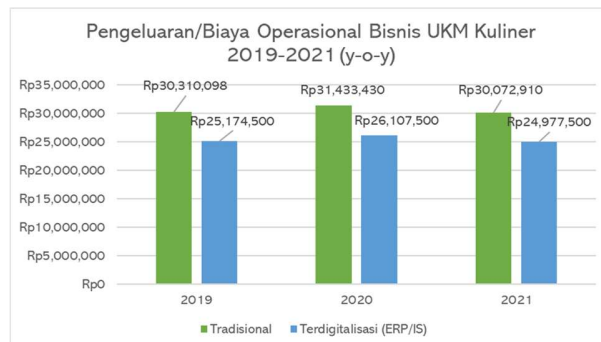


Gambar I. 2 Sebaran Jenis ERP yang Diimplementasi UKM Kuliner Indonesia
(Sumber: Sebaran Produk ERP usaha kuliner Indonesia, 2019)

Menurut Dussoye dan Cadessaib (2018) Odoo dipilih untuk diadopsi oleh mayoritas UKM sektor kuliner dikarenakan sistem ERP Odoo memiliki tingkat fleksibilitas, kelengkapan modul yang tinggi, serta proses pengembangan sistemnya yang cenderung lebih hemat biaya. Mengingat Odoo merupakan jenis ERP *Opensource*, maka keseluruhan modul bawaannya dapat diunduh dan diinstalasi secara gratis oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan data Gambar I.2, mayoritas UKM sektor kuliner memilih untuk mengadopsi Odoo sebagai sistem ERP dalam menjalankan operasional bisnis UKM nya (Aziza dan Rahayu, 2019).

Menurut Ociepa Kubicka (2017) alasan yang UKM dan industri sektor kuliner melakukan adopsi dan implementasi ERP diantaranya, untuk meningkatkan profitabilitas bisnis, keunggulan kompetitif jangka panjang, meningkatkan efektivitas akses informasi dan teknologi, hingga meningkatkan nama baik (*goodwill*) perusahaan. Dalam penelitian lain, menurut Slaman dan Haddara (2019) sistem ERP disinyalir mampu memberikan manfaat kepada bisnis terhadap perkembangan bisnis meliputi penghematan biaya operasional, hingga keunggulan kompetitif.

Menurut Omar (2020), adopsi sistem ERP mampu meningkatkan kinerja UKM sektor kuliner, dengan mengotomatisasi aktivitas bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, serta menciptakan standardisasi yang terstruktur, dan penghematan biaya

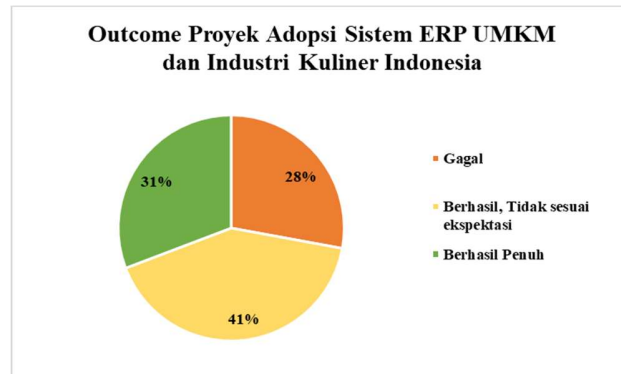


Gambar I. 3 Perbandingan Biaya Operasional UKM Kuliner Terdigitalisasi 2019-2021

Sumber: Perencanaan Strategis Digitalisasi UKM Indonesia (KEMENKOMINFO, 2021)

Berdasarkan Gambar I.3, yang dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021), mengenai perbandingan beban operasional UKM sektor kuliner tradisional dengan UKM kuliner terdigitalisasi, didapatkan bahwa, implementasi teknologi informasi digital (termasuk ERP), mampu mereduksi biaya operasional bisnis dengan *impact rate* sebesar 16.3%, hal ini meliputi pembuatan *quotation*/batasan dalam membeli bahan baku produksi agar tidak melebihi batas gudang, menghapus biaya penyewaan jasa inspeksi inventaris, memangkas biaya peralatan kantor ke bentuk digital (Sukmawati dan Priyadi, 2019).

Menurut Obrenovic dkk. (2020), selain mampu memberikan manfaat dari aspek ekonomi dengan mengurangi biaya operasional, sistem ERP juga mampu memudahkan proses transfer informasi, memfasilitasi proses integrasi data dan menjembatani komunikasi antar pegawai, sehingga pengelolaan informasi dapat dilakukan secara *realtime*. Sistem ERP juga mampu memudahkan bisnis dalam menjalin komunikasi yang berkelanjutan, baik kepada *customer* maupun vendor (*external relation*). Dalam penelitian Omar (2020) terdapat manfaat sosial lain yang dapat diterima perusahaan pasca adopsi ERP, diantaranya, mengurangi durasi kerja di rantai bisnis operasional, meningkatkan kemudahan dalam kolaborasi dan kerjasama antar pegawai dan, mengurangi dampak *silo* dalam lingkungan kerja.



Gambar I.4 Outcome Keberhasilan Adopsi ERP UKM di Indonesia

(Sumber: Pendataan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 2019)

Meski terdapat banyak manfaat dari adopsi sistem ERP dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan produktivitas bisnis UKM sektor kuliner, tingkat kesuksesan implementasi dan adopsi sistem ERP tergolong rendah (Chakravorty dkk. 2016). Berdasarkan survei KBLI (2019) yang diilustrasikan pada Gambar I.4, Tingkat keberhasilan perusahaan dalam merealisasikan proyek adopsi dan implementasi sistem ERP secara penuh tergolong rendah. Hanya 31% UKM dan industri kuliner di Indonesia yang saat ini telah terdigitalisasi oleh sistem ERP secara penuh, sedangkan 28% mengalami kegagalan implementasi, dan 41% lainnya dikategorikan berhasil secara parsial atau dengan kata lain, hasil yang diimplementasi masih tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan.

Untuk menyikapi rendahnya tingkat keberhasilan adopsi sistem ERP yang diterapkan oleh bisnis UKM sektor kuliner di Indonesia, menurut Tongsuksai dkk. (2019) diperlukan kerjasama dan sinergi dari pihak manajerial dan fungsional perusahaan dalam mendukung proses adopsi sistem ERP, hal ini meliputi faktor pengelolaan sumberdaya manusia, ketersediaan teknologi sebagai *requirement* pengembangan sistem ERP, serta ketersediaan finansial guna menyokong pengembangan sistem terintegrasi, yang biasa disebut *corporate readiness*.

Berdasarkan penelitian Hafifah dkk. (2019), *Corporate readiness* didefinisikan sebagai serangkaian kemampuan atau fasilitas yang dimiliki oleh suatu badan usaha maupun organisasi meliputi; ketersediaan perangkat dan sistem informasi (*System*

availability), kemampuan sumberdaya (*Resources availability*), serta kestabilan keuangan (*Financial availability*) yang mampu memberikan pengaruh terhadap tujuan perusahaan. Menurut Baker dan M.Yusof (2016) *corporate readiness* mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan adopsi sistem ERP guna mencapai pertumbuhan bisnis yang efektif dan efisien. Dalam penelitian lain, Chirinos Araque dkk. (2018) menyebutkan, bahwa ketiga aspek *corporate readiness* menjadi parameter kesiapan perusahaan atau UKM dalam merealisasikan adopsi sistem ERP dengan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan adopsi ERP perusahaan hingga 42%.

Meskipun *corporate readiness* memiliki andil yang besar dalam keberhasilan adopsi sistem ERP, menurut Nwankpa (2015) dibutuhkan pengembangan dan pemilihan sistem ERP yang sesuai dan cocok dengan tujuan bisnis yang dimiliki perusahaan (*System Suitability*). Faktor kesesuaian sistem dengan bisnis yang berjalan dapat diindikasikan dengan tiga hal, diantaranya; tingkat kinerja sistem atau perangkat lunak yang diimplementasikan UKM atau perusahaan (*System Performance*), kesesuaian fitur ataupun modul yang dikembangkan dalam sistem dengan kebutuhan bisnis perusahaan (*Feature suitability*), serta ketersediaan aktivitas kustomisasi (*Customization*) yang dilakukan oleh pihak manajemen teknologi informasi, guna mengembangkan sistem agar senantiasa *update* dan adaptif terhadap perubahan kondisi perusahaan maupun tren teknologi terkini (Syahida dkk. 2018).

Menurut Kosasih (2017) dan Wijayanto (2018), upaya untuk mengembangkan sistem ERP yang diadopsi secara jangka panjang oleh perusahaan, tidak terlepas dari andil aktivitas manajemen organisasi (*Organizational Management*) yang intens. Dibutuhkan kesatuan pikiran dan dukungan penuh dari seluruh pihak, khususnya berupa dukungan pemimpin (*leader support*) di bidang teknologi informasi, yang secara inovatif dan cekatan mampu mengoptimalkan penggunaan sistem ERP di rantai operasional, guna dalam mewujudkan perkembangan bisnis yang adaptif. Menurut Belete (2020) Faktor dukungan pemimpin (*leader support*) dalam *organizational management* guna memberikan arahan berupa pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola sistem ERP, sebagai bentuk pencegahan *system worn-out*, disebabkan oleh

versi ERP lawas yang tidak diperbarui.

Berdasarkan penelitian Valashani dan Abukari (2020) Fungsi *organizational management* dalam adopsi sistem ERP juga mencakup bagaimana perusahaan mampu mengelola kompetensi pegawai dengan mengadakan pengelolaan organisasi dengan tujuan yang inovatif (*innovative purpose*), guna meningkatkan efektivitas implementasi ERP, sehingga pihak perusahaan atau UKM mampu mendapatkan manfaat dari adopsi sistem ERP yang optimal. Seluruh pihak perusahaan juga diharapkan untuk dapat beradaptasi (*adaptation*) dengan adanya perubahan aktivitas bisnis pasca adopsi sistem ERP, dimana menurut Saha dkk. (2020), proses adaptasi yang dilakukan dengan tanggap dan cermat oleh pihak manajemen dan fungsional mampu meningkatkan keberhasilan proses adopsi lebih cepat dan efektif.

Menurut Sugiyono (2016) model *Structural Equation Modelling* (SEM) tepat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh antar variabel empiris yang digunakan dalam penelitian, meliputi; faktor-faktor keberhasilan adopsi sistem ERP terhadap perkembangan bisnis UKM kuliner di Kota Bandung dan Jakarta. Dalam penelitian Indrawati (2015) pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah variabel empiris model SEM, tepat dioperasikan dengan menggunakan aplikasi AMOS (*Analysis of Moment Structure*) guna menentukan *confirmatory factor analysis* agar mampu menghasilkan pengukuran model yang konsisten dan fit.

Sebagaimana kebutuhan model adopsi dimana variabel *system suitability* dibangun atas variabel *customization*, maka aktivitas kustomisasi ERP menjadi proses yang diperlukan dalam penelitian, dengan melakukan proses pengembangan modul dan konfigurasi fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan (Fikri, 2022). Proses adopsi sistem ERP pada dasarnya tidak dapat dilakukan dengan optimal apabila fungsi dan fitur yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan (Saputra, 2020). Menurut (Panduwiya, 2020) diperlukan proses kalibrasi atau penyesuaian ketersediaan sistem dan kebutuhan modul dengan melakukan pengembangan dan kustomisasi modul ERP agar perusahaan mampu mengelola dan mengembangkan sistem ERP yang diadopsi.

Menurut Fathurrachman dkk. (2021) sebanyak 78% perusahaan membutuhkan

proses kustomisasi ERP dikarenakan setiap ERP yang diadopsi oleh suatu perusahaan perlu untuk disesuaikan antara proses bisnis yang ada dengan fitur modul yang tersedia. Proses kustomisasi ERP memiliki tujuan dua arah, yakni; untuk menambahkan fitur pelengkap (*addons*) modul ERP sehingga mampu mengakomodasi tingkat kebutuhan bisnis yang lebih tinggi daripada fungsi dasar fitur ERP yang diadopsi, atau untuk melakukan simplifikasi fitur modul ERP, sehingga sistem yang dijalankan oleh perusahaan dalam aktivitas bisnis lebih efisien (Saputra, 2020).

Urgensi atas pentingnya kustomisasi sistem ERP pada UKM sektor kuliner juga sejalan dengan modul-modul yang dioperasikan oleh bisnis yang dijalani itu sendiri, menurut Saputra dkk. (2021) salah satu kustomisasi yang dibutuhkan oleh mayoritas UKM sektor kuliner adalah fitur yang mampu mengelola utang-piutang dan memonitoring arus kas akuntansi secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan proses perhitungan dan monitoring utang-piutang sangat menguras waktu dan rawan akan terjadinya kesalahan perhitungan akibat dari *human error*, selain itu, utang-piutang yang tidak tercatat hingga jatuh tempo menyebabkan aliran kas terhambat dan timbul kerugian besar yang dialami pihak UKM apabila terus-menerus terjadi di ekosistem finansial eksisting UKM sektor kuliner (Nambisan, 2020). Dibutuhkan sistem yang mampu mengotomasi proses monitoring utang-piutang baik yang sedang berjalan maupun jatuh tempo.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya mengeksplorasi hubungan antara faktor penggunaan sistem ERP UKM sektor kuliner, terhadap keberhasilan pengembangan adopsi sistem ERP serta mampu memberikan rekomendasi proses digitalisasi UKM bisnis sektor kuliner sehingga menghasilkan sistem informasi terintegrasi yang mampu dikembangkan secara optimal dan fleksibel. Penelitian ini juga bertujuan untuk merealisasikan program pengembangan industri cerdas yang termasuk ke dalam tujuan pengembangan ekonomi produktif menyongsong era “Indonesia Emas 2045”.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan mengenai pengembangan model adopsi sistem ERP di UKM sektor Rumah Makan, maka penelitian ini diklasifikasikan ke

dalam penelitian dengan studi kasus konfirmatori-kuantitatif. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh kesiapan perusahaan (*Corporate readiness*) terhadap *ERP Adoption* sebagai tolok ukur keberhasilan adopsi sistem ERP UKM sektor Kuliner di Kota Bandung dan Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh kesesuaian sistem (*System Suitability*) terhadap *ERP Adoption* sebagai tolok ukur keberhasilan adopsi sistem ERP UKM sektor Kuliner di Kota Bandung dan Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh manajemen organisasi (*Organizational Management*) terhadap *ERP Adoption* sebagai tolok ukur keberhasilan adopsi sistem ERP UKM sektor Kuliner di Kota Bandung dan Jakarta?
4. Bagaimana kustomisasi modul yang tepat dalam mengoptimalkan adopsi sistem ERP pada UKM sektor kuliner di Kota Bandung dan Jakarta berdasarkan kebutuhan bisnis berjalan?

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *Corporate readiness*, terhadap *ERP Adoption* sebagai tolok ukur keberhasilan adopsi sistem ERP UKM sektor Kuliner di Bandung dan Jakarta
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *System Suitability*, terhadap *ERP Adoption* sebagai tolok ukur keberhasilan adopsi sistem ERP UKM sektor Kuliner di Bandung dan Jakarta
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *Organizational Management*, terhadap *ERP Adoption* sebagai tolok ukur keberhasilan adopsi sistem ERP UKM sektor Kuliner di Bandung dan Jakarta
4. Mengembangkan modul kustomisasi yang tepat berdasarkan kebutuhan bisnis UKM sektor kuliner di Bandung dan Jakarta.

I.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian mengenai analisis adopsi dan evaluasi sistem ERP ini dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni pihak perusahaan yang diteliti dan pihak akademisi, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Instansi bisnis/UKM

Memberikan rekomendasi baik secara teknis maupun manajerial, terkait hasil evaluasi adopsi sistem ERP yang telah diteliti, sehingga mampu menghasilkan sistem bisnis dan operasional yang efektif dan efisien pasca sistem ERP diadopsi. Selain itu, hasil penelitian juga mampu memberikan manfaat, dengan menjadikan sistem ERP yang telah diimplementasi pada penelitian sebagai referensi pengembangan sistem ERP untuk UKM sektor kuliner dan sub bisnis lainnya, dengan pada analisis statistik dengan metode SEM-AMOS.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan dan Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi lain di bidang keilmuan yang sama, mencakup ranah keahlian pengembangan sistem *enterprise* dan solusi industri (*Enterprise Industrial System and Solution*), khususnya untuk konsentrasi rekayasa teknologi digital dan adopsi sistem ERP di lingkungan industri kecil dan menengah. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan yang tepat dalam mengukur tingkat keberhasilan adopsi sistem ERP serta mampu dikembangkan ke dalam penelitian rumpun sistem dan teknologi industri lebih lanjut.

I.6. Batasan Masalah

Untuk membatasi lingkup permasalahan dan tercapainya tujuan penelitian ini, maka dibentuk batasan-batasan masalah, mencakup hal-hal berikut:

1. Jumlah UKM yang diteliti dalam penelitian sebanyak 30-unit yang berlokasi di Kota Bandung dan Jakarta,
2. Unit Analisis yang menjadi responden penelitian adalah karyawan dengan jabatan sebagai staf IT, *manager/head* serta *chief level officer* dari UKM sektor kuliner yang secara langsung mengoperasikan ERP,
3. Hanya meneliti UKM sektor kuliner yang telah menggunakan sistem ERP Odoo,

4. UKM yang sedang beranjak untuk menjadi unit usaha yang lebih besar namun belum memiliki legalitas terkait perubahan status usaha sebagaimana ditetapkan pemerintah, maka tidak menjadi batasan sebagai UKM yang diteliti,
5. Penelitian tidak membahas biaya operasional, baik pemasangan awal, implementasi, kustomisasi maupun perawatan sistem ERP.

I.7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan juga sistematika penelitian. Hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian dimuat pada Bab I.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, metodologi yang digunakan dan studi literatur yang menunjang pelaksanaan penelitian. Bab II ini memuat setidaknya apa yang terkait atau berhubungan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi uraian metode-metode yang digunakan selama penelitian, yang meliputi langkah sistematis apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari topik pembahasan dalam penelitian.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi hasil penelitian mencakup pengembangan model adopsi dan analisis fungsi sistem ERP yang terdiri dari identifikasi masalah, berdasarkan pengukuran menggunakan AMOS, dan diakhiri dengan pengembangan sistem ERP berdasarkan hasil analisis variabel adopsi ERP

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil penelitian tesis yang telah dilakukan untuk UKM sektor kuliner kedepan, serta mampu menjadi

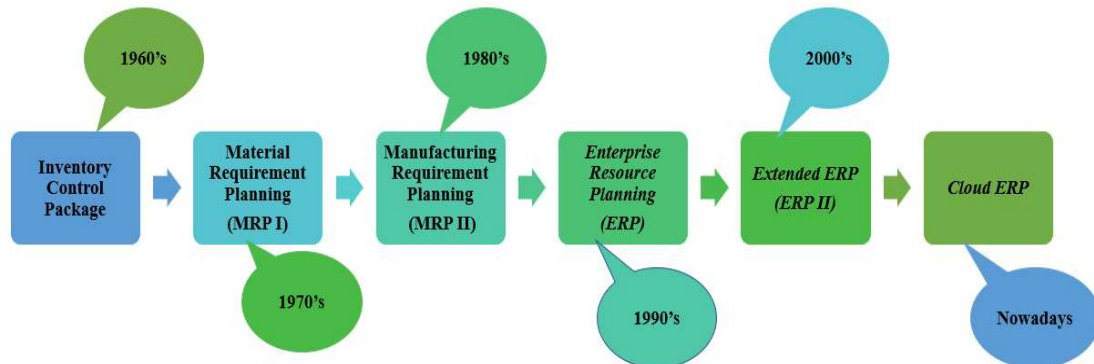
rekomendasi bagi usaha bisnis UKM pada sektor serupa dalam mengembangkan model sistem ERP yang efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

II.1 Tinjauan Pustaka Penelitian

II.1.1 Konsep *Enterprise Resource Planning*



Gambar II. 1 Timeline Transformasi ICP – MRP – ERP

(Sumber: *ERP – Time revolution of Information System*, 2020)

Enterprise Resource Planning atau akronimnya ERP, pertama kali muncul diawal era 1960, yang merupakan bentuk evolusi dari sebuah model matematis dalam melakukan kontrol persediaan barang dan pengadaan material gudang dan mencakup proses penjadwalan dan perencanaan produksi, bernama *Inventory Control Package* (ICP), dan berkembang menjadi *Material Requirement Planning* (MRP) pada 1970 (Justin Goldston, 2020a).

Material Requirement Planning (MRP I) pertama kali dikemukakan oleh Oliver (2020), sebagai sebuah pendekatan matematis terstruktur yang digunakan dalam penjadwalan produksi dari sebuah perusahaan sehingga mampu meningkatkan produktivitas bisnis dengan merencanakan kebutuhan material dan komponen untuk membantu bisnis memenuhi persyaratan minimum, terkait material atau komponen yang dibutuhkan hingga proses produksi selesai (Soffer dkk. 2003).

Tahun 1980, MRP terus berkembang dan semakin digunakan dalam perindustrian, khususnya pada bisnis berbasis manufaktur yang mencakup sistem terotomasi dan permesinan, sehingga MRP I bertransformasi menjadi *Manufacture Resource Planning* (MRP II), dimana hal ini struktur dan model matematis yang